

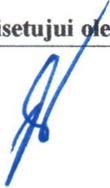
PROSEDUR PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN	NOMOR SOP	: PR/PKBjm/SPI/03
	TGL. PEMBUATAN	: 24 Agustus 2023
	EDISI/REVISI KE	: 01/01
	TGL. REVISI	: 24 Januari 2025
	TGL. EFEKTIF	: 24 Januari 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	23 Agustus 2023	Prosedur ini baru dibuat
01	01	24 Januari 2025	Revisi pada bagian Lembar Pengesahan

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal : 24 Januari 2025</p> <p>Diperiksa oleh</p>  <p>Wira Anom Perdana, S.E, M.M NIP. 197608291997031002</p>	<p>Tanggal : 24 Januari 2025</p> <p>Disusun oleh</p>  <p>Siti Noor A'in A'rifah Puteri, S.Tr.KL NIP.199505092022032002</p>
---	---

Tanggal : 24 Januari 2025
Disetujui oleh

Dr. Junaidi,SKM.,MS NIP. 196604121992031002

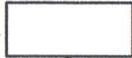
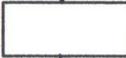


NOMOR SOP	: PR/PKBjm/SPI/03
TGL. PEMBUATAN	: 24 Agustus 2023
EDISI/REVISI KE	: 01/01
TGL. REVISI	: 24 Januari 2025
TGL. EFEKTIF	: 24 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	: Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
NIP. 197512152002121004

PROSEDUR PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Permenkes RI No.008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Permenpan/RB No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan KEMENKES. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedur dan fungsi proses penanganan konflik kepentingan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2. Mengetahui syarat-syarat penanganan konflik kepentingan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 3. Memiliki kemampuan menelaah syarat-syarat yang ditentukan 4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penanganan Konflik Kepentingan 2. Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pengaduan 2. Form Pernyataan Benturan Kepentingan
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka, mengakibatkan penanganan Laporan Konflik Kepentingan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tidak akan terlaksana dengan baik.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai arsip oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pelapor	Petugas Penanganan Konflik Kepentingan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan indikasi terjadinya konflik kepentingan				Form pelaporan, Bukti kasus	1 Hari	Laporan kasus beserta bukti	Pelapor menyampaikan laporan beserta bukti yang ditemukan melalui media pelaporan.
2	Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan				Laptop dan Pedoman	1 Hari	Hasil identifikasi dan kalrifikasi	Petugas penanganan konflik kepentingan menerima laporan dan melakukan identifikasi.
3	Penyusunan Strategi Penanganan Konflik Kepentingan				Hasil identifikasi, Pedoman dan laptop	1 Hari	Strategi penanganan konflik	Tim penanganan melakukan diskusi untuk menyusun strategi penanganan.
4	Tindak lanjut atas Penanganan Konflik Kepentingan				Hasil Klarifikasi dan Rekomendasi Penanganan	1 Hari	Surat Keputusan	Direktur menerbitkan surat keputusan atas penanganan kasus yang ada berdasarkan rekomendasi dari Tim.